

**SINTESIS GEOPOLITIK GLOBAL, REORGANISASI OLIGARKI, DAN
REAKTUALISASI EKONOMI POLITIK PANCASILA DI INDONESIA:
MEMBONGKAR TITIK BUTA DEMOKRASI**

Elwindra¹, Yudhi Hertanto²

Universitas Ibn Khaldun^{1,2}

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 8/7/2026; Direvisi: 13/8/2026; Diterbitkan: 25/8/2026

ABSTRACT

Artikel ilmiah ini bertujuan menganalisis secara kritis pergeseran lanskap ekonomi politik kontemporer pada level global dan domestik serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kajian ini mengintegrasikan enam perspektif teoretis, yaitu John J. Mearsheimer, Ian Bremmer, Jeffrey A. Winters, Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, Mochtar Pabottingi, serta Yudhie Haryono, untuk menjelaskan transformasi liberalisme pasar bebas menuju kapitalisme negara hegemonik yang memperkuat struktur oligarki domestik. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan kritis dengan sumber data berupa buku dan artikel ilmiah yang dipilih berdasarkan relevansi tema, kemudian dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif melalui reduksi, interpretasi, dan sintesis data. Hasil penelitian menunjukkan adanya titik buta (*blind spot*) dalam demokrasi formal Indonesia, di mana kesetaraan hak politik warga negara terdegradasi oleh ketimpangan material. Jaringan patronase warisan Orde Baru juga berhasil melakukan reorganisasi kekuasaan dalam institusi demokrasi pasca-Suharto yang berdampak pada komersialisasi sektor strategis, seperti pendidikan tinggi dan kesehatan publik, serta meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap krisis finansial mikro melalui fintech dan pinjaman daring. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung membahas oligarki atau kapitalisme negara secara parsial, artikel ini menawarkan sintesis integratif enam perspektif teoretis sebagai kontribusi konseptual untuk mereaktualisasikan Ekonomi Politik Pancasila dalam memperkuat kedaulatan rakyat dan tata kelola publik yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Ekonomi Politik, Oligarki, Kapitalisme Negara, Demokrasi, Ekonomi Pancasila.*

ABSTRACT

This scientific article aims to critically analyze shifts in the contemporary political economy landscape at both the global and domestic levels and their impacts on the social life of Indonesian society. This study integrates six theoretical perspectives, namely John J. Mearsheimer, Ian Bremmer, Jeffrey A. Winters, Vedi R. Hadiz and Richard Robison, Mochtar Pabottingi, and Yudhie Haryono, to explain the transformation from free-market liberalism toward hegemonic state capitalism that reinforces domestic oligarchic structures. This research employs a critical literature review method using books and scholarly articles selected based on thematic relevance, which are subsequently analyzed through qualitative content analysis involving data reduction, interpretation, and synthesis. The findings reveal a blind spot in Indonesia's formal democracy, in which the equality of citizens' political rights is undermined by material inequality. Patronage networks inherited from the New Order era have also succeeded in reorganizing power within post-Suharto democratic institutions, resulting in the commercialization of strategic sectors, such as higher education and public healthcare, as well as increasing societal vulnerability to micro-financial crises through fintech and online lending. Unlike previous studies that tend to examine oligarchy or state capitalism separately, this article

offers an integrative synthesis of six theoretical perspectives as a conceptual contribution to revitalizing Pancasila Political Economy in strengthening popular sovereignty and equitable public governance.

Keywords: *Political Economy, Oligarchy, State Capitalism, Democracy, Pancasila Economy.*

PENDAHULUAN

Optimisme global yang berkembang setelah berakhirnya Perang Dingin pada awalnya memperkuat keyakinan bahwa demokrasi liberal dan mekanisme pasar dapat menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan global. Namun, perkembangan ekonomi politik dalam dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa keterbukaan ekonomi tidak selalu menghasilkan distribusi manfaat yang merata dan bahkan berlangsung bersamaan dengan munculnya bentuk-bentuk baru intervensi negara dalam perekonomian. Fragmentasi geoeкономи, proteksionisme perdagangan, persaingan atas komoditas strategis, serta meningkatnya ketidakpastian dalam tata kelola ekonomi internasional menunjukkan adanya perubahan dalam struktur hubungan ekonomi global (Aiyar et al., 2023; Hakobyan et al., 2023; Alvarez et al., 2026). Perubahan tersebut juga memperlihatkan semakin pentingnya peran negara dalam mengarahkan investasi, mengendalikan sektor strategis, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional, sehingga batas antara kepentingan negara dan aktivitas kapital semakin kompleks (Som, 2022; Al-Fadhat, 2023). Dalam perspektif ini, *state capitalism* tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi domestik, tetapi juga sebagai bagian dari respons negara terhadap ketidakpastian geopolitik dan perubahan konfigurasi kapital global.

Dalam perkembangan tersebut, ketimpangan ekonomi dan persoalan distribusi kesejahteraan menjadi dimensi penting yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan struktur ekonomi politik global. Ketidakpastian ekonomi, tekanan utang negara, serta perubahan kebijakan makroekonomi menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam menjaga stabilitas dan memenuhi kebutuhan publik semakin berhadapan dengan tekanan eksternal dan internal (Surdikina et al., 2025; Rohmah et al., 2025). Pada saat yang sama, transformasi ekonomi digital menghasilkan peluang baru bagi inklusi ekonomi, tetapi juga menghadirkan risiko baru berupa ketergantungan finansial dan jebakan utang digital, terutama ketika akses teknologi keuangan berkembang lebih cepat daripada kapasitas literasi dan perlindungan konsumen (Yue et al., 2022; Thomas et al., 2024). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi tidak secara otomatis identik dengan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, persoalan ekonomi politik kontemporer perlu dilihat tidak hanya melalui indikator pertumbuhan, tetapi juga melalui distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya, struktur kekuasaan, dan kemampuan negara menjamin kepentingan publik.

Dalam konteks Indonesia, demokratisasi pascareformasi telah memperluas ruang partisipasi politik dan membuka mekanisme kompetisi elektoral yang lebih terbuka, tetapi perluasan partisipasi politik tersebut belum sepenuhnya menghilangkan konsentrasi kekuasaan ekonomi dan hubungan patronase antara aktor politik dan kepentingan bisnis. Kajian mengenai hubungan bisnis dan politik menunjukkan bahwa pola patrimonialisme, oligarki, dan keterhubungan antara elite politik dengan kepentingan ekonomi masih memengaruhi konfigurasi kekuasaan di tingkat lokal maupun nasional (Haryanto & Mahsun, 2024; Damanik et al., 2025). Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika perubahan ekonomi digital, perkembangan teknologi finansial, dan transformasi struktur ekonomi berlangsung bersamaan dengan proses konsolidasi kekuasaan elite. Transformasi ekonomi digital memang menciptakan peluang bagi peningkatan produktivitas dan inklusi ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait ketimpangan akses, regulasi, dan distribusi manfaat ekonomi (Utami et al.,

2025; Khaliq, 2025). Oleh karena itu, stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dibaca secara kritis karena capaian makroekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan persoalan ketimpangan pendapatan dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat (Samosir & Silalahi, 2026).

Rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan adanya paradoks antara keberhasilan institusional demokrasi dan belum optimalnya pencapaian keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kemunduran demokrasi, menguatnya pengaruh elite, dan konsentrasi kekuasaan dapat mengurangi kapasitas institusi publik dalam memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan bekerja secara inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (Hasibuan et al., 2026; Damanik et al., 2025). Dalam kondisi demikian, relasi antara negara, modal, dan masyarakat menjadi penting untuk dianalisis karena kebijakan ekonomi tidak pernah sepenuhnya terlepas dari konfigurasi kekuasaan yang melingkupinya. Di sisi lain, konsep Ekonomi Pancasila menawarkan perspektif normatif yang menempatkan keadilan sosial, kepentingan bersama, dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan ekonomi (Karimi, 2024). Dengan demikian, persoalan utama bukan sekadar apakah negara harus memperluas atau mengurangi intervensinya dalam perekonomian, melainkan bagaimana kekuasaan ekonomi dan politik dapat diarahkan agar pengelolaan sumber daya publik menghasilkan manfaat yang lebih adil dan demokratis.

Fenomena tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian berbagai penelitian, tetapi literatur yang tersedia masih cenderung memisahkan analisis mengenai fragmentasi geopolitik, *state capitalism*, oligarki, demokrasi, dan Ekonomi Politik Pancasila ke dalam ruang kajian yang berbeda. Kajian mengenai fragmentasi geoekonomi terutama menjelaskan perubahan sistem perdagangan, investasi, dan hubungan antarnegara (Aiyar et al., 2023; Hakobyan et al., 2023; Alvarez et al., 2026), sementara penelitian mengenai *state capitalism* lebih banyak menyoroti meningkatnya peran perusahaan milik negara dan instrumen ekonomi negara dalam menghadapi perubahan lingkungan global (Som, 2022). Di Indonesia, penelitian mengenai oligarki dan hubungan bisnis-politik telah memberikan penjelasan penting mengenai konsolidasi elite dan oligarkisasi demokrasi, tetapi belum secara sistematis menghubungkan proses tersebut dengan perubahan struktur kapitalisme global dan transformasi peran negara (Haryanto & Mahsun, 2024; Damanik et al., 2025). Sementara itu, kajian mengenai Ekonomi Pancasila lebih banyak memberikan argumentasi normatif mengenai keadilan sosial dan kritik terhadap neoliberalisme tanpa mengintegrasikannya secara komprehensif dengan fragmentasi geoekonomi dan reorganisasi kekuasaan oligarkis (Karimi, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan *research gap* berupa belum kuatnya kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara perubahan struktur ekonomi politik global, perkembangan *state capitalism*, konsolidasi oligarki domestik, transformasi ekonomi digital, dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan sintesis lintas perspektif yang menghubungkan dinamika ekonomi politik global dengan perubahan konfigurasi kekuasaan domestik dan agenda keadilan sosial di Indonesia. Pemikiran John J. Mearsheimer digunakan untuk membaca keterbatasan hegemoni liberal dan perubahan struktur kekuasaan dalam sistem internasional, sedangkan perspektif Ian Bremmer digunakan untuk menjelaskan perkembangan *state capitalism* sebagai bentuk reorganisasi hubungan antara negara dan pasar. Pemikiran Jeffrey A. Winters digunakan untuk memahami mekanisme pertahanan kekayaan dan konsolidasi kekuasaan oligarki, sementara perspektif Vedi R. Hadiz dan Richard Robison digunakan untuk menjelaskan reorganisasi kekuasaan serta keberlanjutan

struktur oligarkis dalam konteks Indonesia pascareformasi. Perspektif Mochtar Pabottingi mengenai etika publik dan pemikiran Yudhie R. Haryono mengenai Ekonomi Politik Pancasila selanjutnya digunakan untuk memberikan landasan normatif bagi perumusan alternatif tata kelola ekonomi yang menempatkan kepentingan publik dan keadilan sosial sebagai orientasi utama. Novelty penelitian terletak pada upaya menyatukan keenam perspektif tersebut dalam satu kerangka analisis yang menelusuri hubungan antara fragmentasi geoeкономи, *state capitalism*, reorganisasi oligarki, transformasi ekonomi digital, dan distribusi kesejahteraan di Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis keterkaitan perubahan lanskap ekonomi politik global, perkembangan *state capitalism*, dan konsolidasi oligarki domestik dalam membentuk persoalan sosial-ekonomi Indonesia, sekaligus merumuskan sintesis konseptual mengenai reaktualisasi Ekonomi Politik Pancasila sebagai alternatif untuk memperkuat keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan tata kelola publik yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Critical Literature Review* yang dipadukan dengan *Political Economy Analysis* untuk membangun sintesis konseptual mengenai hubungan antara perubahan ekonomi politik global dan dinamika sosial-ekonomi di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Scopus, Google Scholar, Dimensions, dan Garuda menggunakan kata kunci *political economy*, *oligarchy*, *state capitalism*, *democracy*, *Pancasila economy*, dan *Indonesia*, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu relevan dengan tema penelitian, berasal dari buku akademik dan artikel ilmiah bereputasi, memiliki kontribusi konseptual terhadap ekonomi politik, serta diterbitkan terutama dalam rentang 2020–2026 untuk artikel empiris, sedangkan karya klasik digunakan sebagai literatur primer karena menjadi rujukan utama dalam pengembangan teori. Kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak melalui proses *peer review*, memiliki relevansi rendah dengan fokus penelitian, atau hanya memuat opini tanpa landasan akademik yang memadai. Enam literatur primer yang dianalisis dipilih karena mewakili perspektif yang saling melengkapi, yaitu hubungan antara hegemoni global (John J. Mearsheimer), *state capitalism* (Ian Bremmer), oligarki (Jeffrey A. Winters), reorganisasi kekuasaan pascareformasi (Vedi R. Hadiz dan Richard Robison), etika publik (Mochtar Pabottingi), serta Ekonomi Politik Pancasila (Yudhie R. Haryono), sehingga mampu membentuk kerangka analisis yang komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi dan *thematic coding*, penyusunan matriks sintesis konseptual, serta interpretasi hubungan antarkonsep pada level makro, mezo, dan mikro. Unit analisis penelitian berupa konsep, argumen, dan proposisi utama yang terdapat dalam literatur primer maupun data sekunder, sedangkan instrumen analisis yang digunakan meliputi lembar *thematic coding*, matriks kategorisasi konsep, dan matriks relasi kekuasaan untuk mengidentifikasi keterkaitan antarperspektif. Selanjutnya, kerangka sintesis tersebut diterapkan pada tiga studi kasus, yaitu komersialisasi pendidikan tinggi melalui PTN-BH, pembentukan regulasi yang dinilai mencerminkan *regulatory capture*, serta perkembangan *fintech* dan pinjaman daring. Ketiga kasus dipilih secara purposif karena merepresentasikan keterkaitan antara dimensi global, kebijakan nasional, dan dampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus menunjukkan karakteristik kebijakan yang banyak menjadi perhatian publik dan akademisi dalam beberapa tahun terakhir. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber antara literatur primer, artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan data Badan Pusat Statistik (BPS), disertai *audit trail* selama proses analisis serta *peer debriefing*

untuk memastikan konsistensi interpretasi dan validitas konseptual hasil sintesis yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai kajian yang membahas perubahan ekonomi politik dari perspektif global maupun domestik. Keragaman referensi tersebut mencerminkan bahwa dinamika ekonomi politik tidak dapat dipahami hanya melalui satu dimensi, karena melibatkan hubungan antara negara, pasar, institusi politik, kelompok kepentingan, serta kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan literatur diperlukan untuk mengidentifikasi pendekatan yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu sekaligus memahami kontribusinya terhadap isu yang dikaji. Tabel berikut menyajikan hasil telaah terhadap literatur berdasarkan fokus kajian, metode atau pendekatan, temuan utama, dan relevansinya terhadap penelitian.

Tabel. Literature Review Penelitian

No.	Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode/Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian
1	Ahmad et al. (2025)	Ketimpangan kesehatan dan ketidakadilan struktural dalam JKN Indonesia	Analisis normatif berbasis perspektif Rawlsian	Ketimpangan akses dan distribusi manfaat kesehatan menunjukkan adanya persoalan keadilan struktural dalam sistem jaminan kesehatan	Memperkuat analisis mengenai dampak ketimpangan material dan komersialisasi sektor publik terhadap keadilan sosial
2	Aiyar et al. (2023)	Fragmentasi geoekonomi dan masa depan multilateralisme	Analisis ekonomi politik global	Fragmentasi ekonomi global meningkatkan risiko perdagangan, investasi, dan koordinasi internasional	Menjelaskan perubahan lanskap ekonomi politik global dan pergeseran hubungan antarnegara
3	Aiyar, Presbitero, & Ruta	Fragmentasi geoekonomi dan implikasinya bagi multilateralisme	Kajian konseptual	Fragmentasi geoekonomi memengaruhi kebijakan ekonomi dan hubungan internasional	Mendukung perspektif global mengenai transformasi liberalisme ekonomi
4	Al-Fadhat (2023)	Regulatory capitalism di Asia Tenggara	Analisis ekonomi politik	Fraksi kapital internasional berperan dalam restrukturisasi	Sangat relevan untuk menjelaskan transformasi negara dan penetrasi

No. Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode/Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian
			negara dan regulasi ekonomi	kepentingan kapital dalam kebijakan domestik
5 Alvarez et al. (2026)	Fragmentasi geoekonomi dan pasar komoditas	Analisis ekonomi internasional	Fragmentasi geoekonomi berpengaruh terhadap harga, perdagangan, dan dinamika pasar komoditas	Menghubungkan perubahan geopolitik global dengan konsekuensi ekonomi domestik
6 Alwahidin et al. (2023)	Inklusi keuangan digital dan konsumsi rumah tangga Indonesia	Analisis empiris	Inklusi keuangan digital memengaruhi pola konsumsi rumah tangga	Mendukung pembahasan mengenai transformasi finansial digital dan dampaknya terhadap masyarakat
7 Damanik et al. (2025)	Hubungan bisnis-politik dan oligarkisasi demokrasi Indonesia	Analisis ekonomi politik	Hubungan erat bisnis dan politik mendorong oligarkisasi serta memengaruhi kualitas demokrasi	Menjadi dasar empiris utama untuk menjelaskan reorganisasi kekuasaan oligarki dalam demokrasi
8 Datumula (2025)	Komersialisasi pendidikan tinggi	Kajian literatur	Komersialisasi pendidikan mengubah orientasi institusi pendidikan dan menimbulkan tantangan terhadap fungsi publik pendidikan	Mendukung argumen tentang komersialisasi sektor strategis dan melemahnya fungsi sosial negara
9 Dewi et al. (2025)	Literasi keuangan, perilaku keuangan, dan inklusi keuangan Generasi Z	Analisis empiris	Literasi keuangan berperan dalam hubungan perilaku keuangan dan inklusi keuangan	Relevan untuk menjelaskan kapasitas masyarakat menghadapi ekspansi layanan finansial digital
10 Hakobyan et al. (2023)	Paparan perdagangan terhadap	Analisis empiris ekonomi internasional	Dampak fragmentasi geopolitik berbeda	Memperkuat analisis mengenai ketimpangan dampak

No. Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode/Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian
	fragmentasi geopolitik		antarnegara dan sektor perdagangan	perubahan ekonomi politik global
11 Haryanto & Mahsun (2024)	Bisnis, politik, patrimonialisme, dan oligarki di perkotaan Indonesia	Studi komparatif dua kota	Hubungan patronase dan kepentingan bisnis membentuk praktik politik lokal	Mendukung pembahasan mengenai keberlanjutan jaringan patronase dan reorganisasi kekuasaan pasca-Orde Baru
12 Hasibuan et al. (2026)	Kemunduran demokrasi Indonesia setelah 2024	Analisis institusional dan kekuasaan elite	Kemunduran demokrasi berkaitan dengan kelemahan institusi dan konsentrasi kekuasaan elite	Memperkuat konsep <i>blind spot</i> demokrasi formal dan dominasi elite
13 Hidayat & Shodrokov (2025)	Indeks pembangunan manusia dan stabilitas perbankan ASEAN	Analisis empiris	Kondisi pembangunan manusia berkaitan dengan stabilitas sektor perbankan	Menunjukkan keterkaitan antara pembangunan sosial dan stabilitas ekonomi-finansial
14 Hoseini et al. (2026)	Tata kelola perusahaan yang berafiliasi dengan organisasi militer	Pengembangan model tata kelola	Tata kelola berbasis prinsip OECD diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Relevan bagi pembahasan hubungan kekuasaan, institusi negara, dan tata kelola kapital
15 Jameaba (2024)	Digitalisasi, teknologi baru, dan stabilitas finansial Indonesia	Kajian konseptual	Digitalisasi memberikan peluang sekaligus risiko terhadap stabilitas sektor perbankan	Mendukung analisis transformasi ekonomi digital dan potensi kerentanan finansial
16 Karimi (2024)	Ekonomi Pancasila, keadilan sosial, dan neoliberalisme global	Analisis konseptual	Neoliberalisme menghadirkan tantangan terhadap prinsip keadilan sosial dan Ekonomi Pancasila	Menjadi landasan normatif untuk menawarkan reaktualisasi Ekonomi Politik Pancasila

No. Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode/Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian
17 Khaliq (2025)	Dampak COVID-19 terhadap fintech lending di Indonesia	Interrupted Time Series Analysis	Pandemi memengaruhi perkembangan dan dinamika fintech lending di Indonesia	Mendukung pembahasan mengenai ekspansi fintech dan perubahan pola pembiayaan masyarakat
18 Mahendra (2026)	Kekuasaan dan pengambilan keputusan politik dalam demokrasi modern	Tinjauan literatur	Pengambilan keputusan politik dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan elite	Memperkuat perspektif mengenai distribusi kekuasaan dalam sistem demokrasi
19 Prayuti et al. (2025)	Perlindungan konsumen dalam perkembangan fintech Indonesia	Analisis hukum	Pertumbuhan fintech membutuhkan penguatan perlindungan hukum dan regulasi konsumen	Mendukung analisis risiko pinjaman daring dan meningkatnya kerentanan masyarakat
20 Purba et al. (2023)	Globalisasi dan ekonomi nasional dalam perspektif ekonomi politik	Kajian ekonomi politik	Globalisasi memberikan peluang sekaligus tekanan terhadap struktur ekonomi nasional	Menjadi penghubung antara dinamika ekonomi global dan perubahan ekonomi nasional
21 Rahmatulummah et al. (2025)	Peluang ekonomi Indonesia melalui OECD dan BRICS	Analisis strategis	Keanggotaan dan keterlibatan dalam forum ekonomi internasional membuka peluang sekaligus tantangan strategis	Mendukung analisis posisi Indonesia dalam perubahan tatanan ekonomi global
22 Rohmah (2024)	Pergeseran politik Indonesia dari demokrasi menuju oligarki	Analisis politik	Konsentrasi kekuasaan dan pengaruh elite memperlihatkan kecenderungan oligarkisasi politik	Sangat relevan dengan pembahasan tentang degradasi substansi demokrasi
23 Rohmah et al. (2025)	Globalisasi, kemiskinan, dan	Analisis ekonomi	Globalisasi dan kebijakan makroekonomi	Mendukung hubungan antara struktur ekonomi

No. Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode/Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian
	kebijakan makroekonomi		berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan persoalan kemiskinan	makro dan kondisi sosial masyarakat
24 Samosir & Silalahi (2026)	Ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia	Analisis ekonomi	Ketimpangan pendapatan menjadi persoalan penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi	Memperkuat argumen bahwa ketimpangan material dapat membatasi kesetaraan politik substantif
25 Sarjono et al. (2026)	Peluang ekonomi Indonesia di pasar berkembang	Analisis ekonomi	Indonesia memiliki peluang pertumbuhan melalui pasar berkembang dan integrasi ekonomi	Memberikan perspektif mengenai peluang ekonomi Indonesia dalam perubahan tatanan global
26 Sharma & Soederberg (2020)	World Economic Forum dan manajemen risiko global	Analisis kritis ekonomi politik	Tata kelola risiko global turut dibentuk oleh aktor non-negara dan kepentingan kapital transnasional	Memberikan fondasi kritis mengenai peran aktor kapital global dalam pembentukan kebijakan ekonomi
27 Som (2022)	Kapitalisme negara dan perusahaan milik negara	Analisis konseptual	BUMN merupakan instrumen penting kapitalisme negara, tetapi menghadapi persoalan tata kelola dan efisiensi	Menjadi landasan teoritis utama untuk memahami karakter kapitalisme negara
28 Sui-Ni (2023)	Peran pemerintah pusat dan daerah dalam pendidikan dasar	Kajian kebijakan	Koordinasi pemerintah dan kualitas penyediaan pendidikan menentukan pencapaian tujuan pembangunan pendidikan	Mendukung analisis mengenai tanggung jawab negara terhadap sektor publik dan pendidikan

No. Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode/Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian
29 Surdikina et al. (2025)	Pengelolaan utang negara dalam ketidakpastian global	Kajian kebijakan	Pengelolaan utang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal	Menjelaskan konsekuensi kebijakan ekonomi global terhadap ruang fiskal negara
30 Susilo et al. (2025)	Tantangan organisasi dan pembiayaan JKN Indonesia	Analisis kebijakan dan sistem kesehatan	Pembiayaan dan kapasitas organisasi menjadi tantangan dalam pencapaian universal health coverage	Memperkuat pembahasan mengenai ketimpangan dan persoalan tata kelola sektor kesehatan
31 Thomas et al. (2024)	Literasi keuangan, modal sosial, teknologi finansial, dan inklusi keuangan mahasiswa Indonesia	Analisis empiris	Literasi keuangan, modal sosial, dan fintech berhubungan dengan inklusi keuangan	Mendukung pembahasan mengenai perubahan perilaku ekonomi masyarakat akibat digitalisasi finansial
32 Utami et al. (2025)	Transformasi ekonomi digital Indonesia	Kajian literatur	Ekonomi digital menghadirkan peluang pertumbuhan sekaligus tantangan terhadap struktur ekonomi	Menjadi dasar untuk menjelaskan transformasi ekonomi kontemporer dan dampaknya terhadap masyarakat
33 Warburton (2024)	Kekuasaan privat dan jabatan publik di Indonesia	Analisis politik ekonomi	Meningkatnya politisi berlatar belakang bisnis memperlihatkan semakin eratnya hubungan kekuasaan ekonomi dan politik	Sangat relevan untuk menjelaskan penetrasi kepentingan bisnis dalam institusi politik
34 Widiati (2024)	<i>Regulatory capture</i> dalam pembentukan peraturan	Analisis hukum tata negara	Kepentingan tertentu dapat memengaruhi proses pembentukan regulasi dalam negara demokrasi	Mendukung analisis mengenai dominasi kepentingan ekonomi terhadap institusi negara

No. Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode/Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian
35 Wuwung et al. (2024)	Kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan Indonesia	Analisis kebijakan	Pengelolaan sumber daya kelautan membutuhkan integrasi kebijakan, kepentingan ekonomi, dan keberlanjutan	Menunjukkan kompleksitas hubungan negara, kepentingan ekonomi, dan sumber daya strategis
36 Yue et al. (2022)	Keuangan digital: inklusi atau jebakan utang	Analisis ekonomi keuangan	Digital finance dapat memperluas inklusi sekaligus meningkatkan risiko jebakan utang	Sangat relevan dengan pembahasan kerentanan masyarakat terhadap fintech dan pinjaman daring

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai ekonomi politik kontemporer telah berkembang ke berbagai arah, tetapi masih terdapat keterpisahan antara analisis struktur global, konfigurasi kekuasaan domestik, dan konsekuensi sosial yang ditimbulkannya. Sejumlah penelitian menempatkan perubahan ekonomi global sebagai persoalan perdagangan dan fragmentasi, sementara kajian lainnya lebih menekankan hubungan antara elite, bisnis, negara, dan demokrasi. Pada sisi sosial, perhatian penelitian juga berkembang pada persoalan akses layanan publik, transformasi pendidikan, ketimpangan, serta perubahan pola pembiayaan akibat digitalisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang analitis untuk menghubungkan dinamika ekonomi politik global dengan reorganisasi kekuasaan domestik dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam satu kerangka yang lebih integratif. Pendekatan demikian penting untuk memperjelas posisi penelitian ini dalam mengembangkan perspektif Ekonomi Politik Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan tata kelola publik sebagai bagian penting dari respons terhadap perubahan ekonomi politik kontemporer.

Analisis deviasi diperlukan untuk melihat sejauh mana perkembangan sosial-ekonomi kontemporer masih sejalan dengan orientasi normatif Ekonomi Politik Pancasila. Kerangka ini menempatkan aktivitas ekonomi bukan semata-mata sebagai mekanisme penciptaan pertumbuhan, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan, pemerataan, dan keadilan sosial. Berdasarkan telaah literatur, berbagai perubahan dalam struktur ekonomi dan politik menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pembangunan modern dengan prinsip ekonomi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, sintesis berikut digunakan untuk mempertemukan dimensi normatif Ekonomi Politik Pancasila dengan berbagai persoalan empiris yang ditemukan dalam literatur, sekaligus mengidentifikasi arah pembenahan yang diperlukan.

Tabel. Sintesis Hasil Analisis Deviasi Kondisi Sosial-Ekonomi Indonesia terhadap Mandat Ekonomi Politik Pancasila

No.	Dimensi Mandat Ekonomi Politik Pancasila	Kondisi Sosial-Ekonomi yang Teridentifikasi	Bentuk Deviasi	Dampak Sosial-Ekonomi	Referensi Pendukung	Arah Reaktualisasi
1	Keadilan sosial dan pemerataan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan distribusi manfaat yang merata dan masih terdapat ketimpangan pendapatan	Ketimpangan distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi	Memperlebar kesenjangan sosial serta membatasi kemampuan kelompok rentan menikmati hasil pembangunan	Samosir & Silalahi (2026); Rohmah et al. (2025); Ahmad et al. (2025)	Memperkuat kebijakan redistributif, perlindungan sosial, dan pemerataan kesempatan ekonomi
2	Kedaulatan rakyat atas sumber daya ekonomi	Pengelolaan sektor strategis semakin dipengaruhi interaksi antara kepentingan negara, bisnis, dan elite politik	Konsentrasi penguasaan sumber daya pada jaringan ekonomi-politik tertentu	Manfaat sumber daya strategis berpotensi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan	Damanik et al. (2025); Warburton (2024); Al-Fadhat (2023)	Memperkuat pengawasan publik, transparansi kepemilikan, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya
3	Demokrasi ekonomi	Institusi demokrasi berjalan bersamaan dengan meningkatnya hubungan bisnis-politik dan konsentrasi kekuasaan elite	Demokrasi formal belum sepenuhnya menghasilkan distribusi kekuasaan ekonomi yang demokratis	Kebijakan publik berpotensi lebih responsif terhadap kepentingan elite dibandingkan kelompok masyarakat luas	Haryanto & Mahsun (2024); Rohmah (2024); Hasibuan et al. (2026)	Memperkuat demokrasi substantif, partisipasi masyarakat, dan pembatasan konflik kepentingan
4	Peran negara sebagai pengarah perekonomian	Negara menghadapi penetrasi kepentingan kapital domestik dan transnasional dalam proses regulasi dan kebijakan	Perubahan fungsi negara dari pengarah kepentingan publik menuju arena negosiasi kepentingan kapital	Kebijakan ekonomi dapat kehilangan orientasi pemerataan dan kesejahteraan	Al-Fadhat (2023); Widiati (2024); Sharma & Soederberg (2020)	Mengembalikan kapasitas negara sebagai regulator dan pengendali kepentingan strategis nasional
5	Penguasaan negara atas sektor strategis untuk kemakmuran rakyat	BUMN dan sektor strategis menjadi bagian penting dari konfigurasi kapitalisme negara, tetapi menghadapi	Orientasi ekonomi negara dapat berhadapan dengan tuntutan efisiensi dan kepentingan komersial	Potensi konflik antara tujuan keuntungan, kepentingan negara, dan pelayanan publik	Som (2022); Hoseini et al. (2026)	Meningkatkan tata kelola BUMN, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi kemanfaatan publik

No.	Dimensi Mandat Ekonomi Politik Pancasila	Kondisi Sosial-Ekonomi yang Teridentifikasi	Bentuk Deviasi	Dampak Sosial-Ekonomi	Referensi Pendukung	Arah Reaktualisasi
6	Akses yang adil terhadap layanan kesehatan	persoalan tata kelola Sistem JKN menghadapi persoalan organisasi, pembiayaan, dan ketimpangan akses	Hak sosial belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi akses kesehatan yang setara	Kelompok sosial-ekonomi tertentu lebih rentan menghadapi keterbatasan akses dan pembiayaan kesehatan	Ahmad et al. (2025); Susilo et al. (2025)	Memperkuat pembiayaan publik, pemerataan fasilitas, dan perlindungan kelompok rentan
7	Pendidikan sebagai instrumen kesejahteraan rakyat	Pendidikan tinggi menghadapi kecenderungan komersialisasi sementara kualitas layanan pendidikan masih dipengaruhi kapasitas pembiayaan	Pergeseran orientasi pendidikan dari kepentingan publik menuju logika pasar	Akses pendidikan berkualitas berpotensi semakin dipengaruhi kemampuan ekonomi	Datumula (2025); Sui-Ni (2023)	Memperkuat pembiayaan pendidikan publik dan menjamin akses pendidikan berkualitas
8	Pemerataan pembangunan	Transformasi ekonomi digital berlangsung tidak seragam antarwilayah dan kelompok masyarakat	Ketimpangan akses terhadap infrastruktur dan kapasitas digital	Digitalisasi berpotensi memperluas kesenjangan antara wilayah dan kelompok yang memiliki kemampuan berbeda	Utami et al. (2025); Alwahidin et al. (2023)	Mendorong pembangunan infrastruktur digital yang merata dan peningkatan literasi digital
9	Inklusi ekonomi dan keuangan	Fintech dan layanan keuangan digital memperluas akses pembiayaan, tetapi sekaligus menciptakan risiko baru bagi konsumen	Inklusi finansial belum selalu identik dengan perlindungan dan kesejahteraan finansial	Masyarakat rentan dapat menghadapi utang, biaya pembiayaan, dan risiko perlindungan konsumen	Khaliq (2025); Prayuti et al. (2025); Yue et al. (2022)	Memperkuat literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan regulasi fintech
10	Kemandirian ekonomi nasional	Integrasi ekonomi Indonesia semakin dipengaruhi perubahan konfigurasi ekonomi dan	Ketergantungan terhadap modal, pasar, dan rantai pasok eksternal dapat membatasi ruang kebijakan	Kerentanan ekonomi domestik meningkat ketika terjadi fragmentasi dan perubahan hubungan ekonomi global	Aiyar et al. (2023); Alvarez et al. (2026); Rahmatulummah et al. (2025)	Meningkatkan diversifikasi ekonomi, ketahanan rantai pasok, dan kapasitas produksi nasional

No.	Dimensi Mandat Ekonomi Politik Pancasila	Kondisi Sosial-Ekonomi yang Teridentifikasi	Bentuk Deviasi	Dampak Sosial-Ekonomi	Referensi Pendukung	Arah Reaktualisasi
11	Pengelolaan sumber daya untuk kepentingan rakyat	geopolitik global Sektor sumber daya strategis dapat menjadi arena pertemuan kepentingan negara, investor asing, dan oligarki domestik	Kepentingan akumulasi kapital berpotensi menggeser orientasi kemakmuran kolektif	Manfaat ekonomi dapat terkonsentrasi sementara masyarakat dan lingkungan menanggung sebagian biaya pembangunan	Wuwung et al. (2024); Warburton (2024)	Memperkuat pengawasan sumber daya, perlindungan masyarakat, dan prinsip keberlanjutan
12	Keadilan dalam tata kelola regulasi	Proses regulasi berpotensi dipengaruhi kepentingan ekonomi dan kelompok yang memiliki akses politik	Terjadinya <i>regulatory capture</i> dan ketimpangan pengaruh dalam proses kebijakan	Regulasi berisiko tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan publik	Widiati (2024); Al-Fadhat (2023)	Meningkatkan transparansi legislasi, partisipasi publik, dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan
13	Stabilitas dan kesejahteraan ekonomi	Ketidakpastian global, pengelolaan utang, dan perubahan kondisi ekonomi internasional memengaruhi ruang kebijakan domestik	Stabilitas ekonomi dapat lebih berorientasi pada pengendalian risiko makro daripada pemerataan kesejahteraan	Beban penyesuaian ekonomi berpotensi dirasakan tidak proporsional oleh kelompok masyarakat	Surdikina et al. (2025); Hidayat & Shodrokov (2025)	Menyeimbangkan stabilitas makroekonomi dengan perlindungan sosial dan pemerataan
14	Keseimbangan antara pertumbuhan dan kesejahteraan	Integrasi pasar dan peluang investasi membuka ruang pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya tidak otomatis tersebar secara merata	Orientasi pertumbuhan dapat mengungguli tujuan pemerataan	Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan ketimpangan sosial	Sarjono et al. (2026); Purba et al. (2023)	Mengarahkan pertumbuhan pada penciptaan pekerjaan layak, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan
15	Kedaulatan ekonomi dalam perubahan tatanan global	Fragmentasi geoekonomi mengubah hubungan perdagangan, investasi, dan rantai pasok internasional	Ruang pilihan kebijakan nasional semakin dipengaruhi tekanan eksternal	Negara menghadapi dilema antara menarik investasi, mempertahankan otonomi kebijakan, dan melindungi		

No. Dimensi Mandat Ekonomi Politik Pancasila	Kondisi Sosial- Ekonomi yang Teridentifikasi	Bentuk Deviasi	Dampak Sosial- Ekonomi	Referensi Pendukung	Arah Reaktualisasi
			kepentingan domestik		

Hasil sintesis menunjukkan bahwa deviasi terhadap mandat Ekonomi Politik Pancasila bersifat multidimensional dan saling berkaitan antara aspek ekonomi, politik, kelembagaan, serta pelayanan publik. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan distribusi hasil pembangunan, tetapi juga dengan kualitas institusi yang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya, regulasi, dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks tersebut, perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi dapat memberikan peluang pembangunan, tetapi sekaligus memperbesar risiko ketimpangan apabila tidak disertai kapasitas negara dan mekanisme pengawasan yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan pasar, investasi, kapitalisme negara, atau digitalisasi itu sendiri, melainkan pada konfigurasi hubungan negara, pasar, dan masyarakat yang menentukan arah serta distribusi manfaat pembangunan. Reaktualisasi Ekonomi Politik Pancasila karena itu perlu diarahkan pada penguatan kapasitas negara, demokrasi substantif, perlindungan kelompok rentan, serta tata kelola ekonomi yang memastikan pertumbuhan tetap berada dalam kerangka keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetrasi *state capitalism* global tidak semata-mata ditandai oleh bertambahnya kepemilikan negara dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh perubahan cara negara mengarahkan investasi, mengendalikan sektor strategis, membentuk regulasi, dan memengaruhi distribusi sumber daya. Fragmentasi geoekonomi, persaingan atas komoditas strategis, serta perubahan konfigurasi perdagangan telah mendorong negara semakin aktif menggunakan instrumen ekonomi untuk mempertahankan kepentingan nasional (Aiyar et al., 2023; Aiyar et al., 2024; Alvarez et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, kecenderungan tersebut terlihat melalui penguatan peran BUMN, kebijakan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya strategis sebagai instrumen pembangunan nasional (Som, 2022; Al-Fadhat, 2023; Sarjono et al., 2026). Penguatan peran negara tidak berarti mekanisme pasar kehilangan relevansinya, tetapi menunjukkan terbentuknya hubungan yang semakin kompleks antara negara, perusahaan, dan modal privat. Persoalan utama *state capitalism* karena itu tidak hanya terletak pada besarnya intervensi negara, tetapi pada kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan institusi publik mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu (Hoseini et al., 2026). Dalam perspektif ini, penetrasi *state capitalism* di Indonesia dapat dipahami sebagai proses reorganisasi hubungan negara dan kapital yang sekaligus membuka peluang pembangunan serta menghadirkan risiko konsentrasi sumber daya dan kekuasaan.

Konsekuensi sosial dari perubahan tersebut terlihat pada persoalan ketimpangan, kerentanan tenaga kerja, dan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya merata. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang investasi dan transformasi struktural memang dapat meningkatkan produktivitas serta membuka kesempatan kerja, tetapi manfaatnya tidak selalu tersebar secara proporsional di antara kelompok sosial dan wilayah. Globalisasi ekonomi, perubahan kebijakan makroekonomi, serta ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan

pertumbuhan agregat berjalan bersamaan dengan meningkatnya kerentanan kelompok tertentu, sehingga keberhasilan ekonomi tidak cukup dinilai melalui indikator pertumbuhan semata (Purba et al., 2023; Rohmah et al., 2025; Samosir & Silalahi, 2026). Kondisi pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh struktur regulasi dan distribusi kekuasaan karena fleksibilitas hubungan kerja, informalitas, serta perubahan kebutuhan keterampilan dapat menempatkan sebagian pekerja pada posisi tawar yang lebih lemah. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai penggerak investasi dan pertumbuhan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan terciptanya pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil. Temuan tersebut memperluas pemahaman mengenai *state capitalism* dari persoalan kepemilikan dan investasi menuju pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat pertumbuhan, siapa yang menanggung risikonya, serta bagaimana institusi negara mengelola distribusi keuntungan dan beban pembangunan.

Hubungan antara negara, modal, dan regulasi selanjutnya menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan arena kontestasi kepentingan yang tidak selalu memiliki tingkat pengaruh yang seimbang. Ketika kelompok bisnis memiliki akses lebih besar terhadap proses perumusan kebijakan, regulasi yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik berpotensi lebih responsif terhadap kepentingan aktor yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik. Konsep *regulatory capture* menjadi relevan untuk menjelaskan kondisi ketika kepentingan pihak yang diatur dapat memengaruhi proses regulasi sehingga batas antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi menjadi semakin kabur (Al-Fadhat, 2023; Widiati, 2024). Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kekuasaan ekonomi dan politik juga tercermin dalam berkembangnya *business politicians*, patronase, dan hubungan timbal balik antara jabatan publik dengan kepentingan bisnis (Warburton, 2024; Haryanto & Mahsun, 2024; Damanik et al., 2025). Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan pemilu dan institusi representatif, tetapi juga berdasarkan kemampuan lembaga publik membatasi konsentrasi kekuasaan, menjamin transparansi, serta mempertanggungjawabkan proses pembuatan kebijakan kepada masyarakat. Reorganisasi kekuasaan ekonomi melalui institusi formal menunjukkan bahwa oligarki dapat bekerja melalui kebijakan investasi, regulasi, penguasaan sumber daya, dan keputusan pembangunan. Temuan ini memperkuat perspektif Hadiz dan Robison mengenai reorganisasi kekuasaan pascareformasi serta pemikiran Winters mengenai hubungan antara konsentrasi kekayaan dan kekuasaan politik, sekaligus menunjukkan bahwa oligarkisasi demokrasi Indonesia tetap menjadi persoalan penting dalam tata kelola negara kontemporer (Warburton, 2024; Damanik et al., 2025; Rohmah, 2024).

Ketegangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan juga tampak dalam penyelenggaraan layanan dasar, terutama pendidikan tinggi dan kesehatan. Pada sektor pendidikan tinggi, peningkatan otonomi kelembagaan dan fleksibilitas pembiayaan dapat memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas akademik dan manajerial, tetapi komersialisasi pendidikan berpotensi menggeser orientasi layanan publik apabila peningkatan pendapatan institusi tidak disertai mekanisme perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Datumula, 2025). Peran pemerintah pusat dan daerah tetap diperlukan untuk memastikan pendidikan bermutu dapat diakses secara merata karena penyediaan pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang (Sui-Ni, 2023). Dilema yang muncul bukan sekadar pilihan antara efisiensi kelembagaan dan intervensi negara, melainkan bagaimana otonomi institusi dapat dikembangkan tanpa mengurangi tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan sebagai layanan publik. Persoalan yang sejalan juga terlihat dalam

sektor kesehatan melalui penyelenggaraan JKN. Perluasan perlindungan kesehatan menunjukkan kapasitas negara dalam memperluas akses masyarakat, tetapi cakupan kepesertaan belum secara otomatis menjamin kesetaraan substantif karena masih terdapat persoalan distribusi fasilitas, kualitas pelayanan, kapasitas pembiayaan, serta kesenjangan akses antarkelompok masyarakat (Ahmad et al., 2025; Susilo et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan layanan publik perlu dinilai bukan hanya berdasarkan cakupan program, tetapi juga melalui kualitas pelayanan, keterjangkauan, pemerataan fasilitas, dan keberlanjutan pembiayaan.

Transformasi ekonomi digital memperlihatkan bentuk baru hubungan antara negara, kapital, teknologi, dan masyarakat melalui perkembangan *financial technology (fintech)*. Digitalisasi keuangan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan finansial dan pembiayaan, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya menghadapi hambatan dalam mengakses lembaga keuangan formal (Alwahidin et al., 2023). Namun, perluasan akses tersebut bersifat ambivalen karena kemudahan memperoleh pembiayaan juga dapat meningkatkan risiko utang, gagal bayar, dan kerentanan konsumen apabila tidak disertai literasi serta perlindungan yang memadai (Yue et al., 2022; Khaliq, 2025). Penelitian mengenai literasi keuangan menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat memahami dan mengelola produk finansial merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas inklusi keuangan, sehingga teknologi tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya solusi atas persoalan eksklusi finansial (Dewi et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi politik, *fintech* juga dapat dipahami sebagai infrastruktur baru bagi ekspansi kapital karena data, algoritma, platform, dan akses kredit semakin menjadi bagian dari proses pembentukan nilai ekonomi. Kondisi tersebut menuntut negara untuk menjaga keseimbangan antara dorongan terhadap inovasi dan perlindungan masyarakat dari praktik pembiayaan yang eksploitatif. Penguatan perlindungan konsumen menjadi semakin penting karena perkembangan industri *fintech* membawa persoalan mengenai kredit bermasalah, praktik penagihan, keamanan data, dan ketimpangan informasi antara penyedia layanan dan konsumen (Prayuti et al., 2025). Dengan demikian, inklusi keuangan seharusnya tidak hanya diukur melalui peningkatan jumlah pengguna layanan digital, tetapi juga melalui kemampuan sistem finansial menciptakan keamanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sintesis temuan menunjukkan bahwa *state capitalism*, oligarki, layanan publik, pasar tenaga kerja, dan *fintech* memiliki titik temu pada persoalan distribusi kekuasaan serta manfaat pembangunan. Pendidikan, kesehatan, sumber daya strategis, pasar tenaga kerja, dan keuangan digital sama-sama memperlihatkan ketegangan antara orientasi efisiensi, investasi, dan pertumbuhan dengan tuntutan pemerataan, perlindungan sosial, dan kepentingan publik. Temuan ini tidak menunjukkan bahwa intervensi negara, investasi swasta, atau mekanisme pasar secara inheren bertentangan dengan Ekonomi Politik Pancasila, tetapi menegaskan pentingnya institusi yang mampu mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas ekonomi agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam kerangka tersebut, Ekonomi Pancasila dapat ditempatkan sebagai perspektif normatif-kritis yang menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar (Karimi, 2024). Reaktualisasi Ekonomi Politik Pancasila perlu diarahkan pada penguatan negara sebagai regulator, distributor, dan penjamin kepentingan publik dengan tetap memberikan ruang produktif bagi sektor swasta dan inovasi ekonomi. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan investasi, BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi digital memiliki mekanisme akuntabilitas serta orientasi

distribusi manfaat yang jelas. Dalam konteks tersebut, demokrasi ekonomi tidak hanya berarti keberadaan mekanisme pasar atau partisipasi formal dalam proses politik, tetapi juga kemampuan masyarakat memengaruhi arah pembangunan dan memperoleh manfaat yang adil dari proses ekonomi. Dengan demikian, Ekonomi Politik Pancasila dapat dikembangkan sebagai kerangka normatif-kritis untuk mengevaluasi penetrasi *state capitalism*, membatasi konsentrasi kekuasaan ekonomi, serta membangun tata kelola ekonomi Indonesia yang mengintegrasikan kapasitas negara, dinamika pasar, inovasi teknologi, demokrasi substantif, dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa berbagai persoalan sosial-ekonomi di Indonesia, seperti meningkatnya kerentanan pasar kerja, komersialisasi layanan publik, dan berkembangnya kerentanan keuangan digital, merupakan fenomena yang saling berkaitan dalam suatu struktur ekonomi politik yang kompleks, bukan sekadar persoalan sektoral yang berdiri sendiri. Hasil penelitian menghasilkan sebuah model sintesis konseptual yang mengintegrasikan enam perspektif ekonomi politik, yaitu John J. Mearsheimer, Ian Bremmer, Jeffrey A. Winters, Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, Mochtar Pabottingi, serta Yudhie R. Haryono, untuk menjelaskan keterkaitan antara *state capitalism*, oligarki, demokrasi, dan Ekonomi Politik Pancasila dalam konteks Indonesia kontemporer. Model tersebut menunjukkan bahwa perubahan konfigurasi ekonomi politik global memengaruhi dinamika kekuasaan domestik melalui proses reorganisasi elite, yang selanjutnya berdampak pada arah kebijakan publik dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi politik Indonesia dengan menawarkan kerangka analisis integratif yang menghubungkan dimensi global, nasional, dan sosial secara simultan, sehingga melengkapi penelitian terdahulu yang umumnya masih membahas masing-masing perspektif secara terpisah.

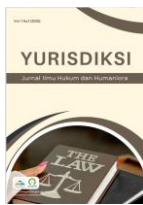
Berdasarkan temuan penelitian, penguatan tata kelola ekonomi dan kebijakan publik perlu diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta penguatan fungsi negara dalam penyediaan layanan publik yang berkeadilan sesuai prinsip Ekonomi Politik Pancasila. Selain itu, pengembangan ekosistem keuangan inklusif, penguatan kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat, serta peningkatan kualitas regulasi di sektor strategis dapat menjadi langkah implementatif yang sejalan dengan hasil penelitian ini. Bagi kalangan akademisi, model sintesis konseptual yang dihasilkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan melalui pengujian empiris menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods*, studi komparatif antarnegara, atau analisis pada sektor-sektor kebijakan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, dan ekonomi digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian ekonomi politik, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan model analisis yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara perubahan ekonomi global, tata kelola demokrasi, dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Raphael, A., Zuwanda, S. S., Ramsay, S., & Fomba (2025). D. Health Inequality And Structural Injustice In Indonesia's National Health Insurance System: A Rawlsian Analysis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14(2), 223-240. <https://doi.org/10.14421/Sh.Ctp9wt64>
- Aiyar, S., Chen, J., Ebeke, C., Garcia-Saltos, R., Gudmundsson, T., Ilyina, A., ... & Trevino, J. P. (2023). *Geeconomic Fragmentation And The Future Of Multilateralism*. IMF Staff

- Discussion Note*. SDN/2023/01, Washington, DC: International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400229046.006>
- Aiyar, S., Presbitero, A. F., & Ruta, M. Discussion Of Geoeconomic Fragmentation And The Future Of Multilateralism 1. In *Geoeconomic Fragmentation*. Center For Economic Policy Research (CEPR). <https://doi.org/10.5089/GFERFWEEA.072>
- Al-Fadhat, F. (2023). Regulatory Capitalism Di Asia Tenggara: Transformasi Dan Peran Fraksi Kapital Internasional Dalam Restrukturisasi Negara. *Intermestic: Journal Of International Studies*, 7(2), 501-527. <https://doi.org/10.24198/Intermestic.V7n2.6>
- Alvarez, J., Andaloussi, M. B., Maggi, C., Sollaci, A., Stuermer, M., & Topalova, P. (2026). Geoeconomic Fragmentation And Commodity Markets. *Journal Of International Money And Finance*, 103555. <https://doi.org/10.5089/9798400252426.001>
- Alvarez, J., Andaloussi, M. B., Maggi, C., Sollaci, A., Stuermer, M., & Topalova, P. (2026). Geoeconomic Fragmentation And Commodity Markets. *Journal Of International Money And Finance*, 103555. <https://doi.org/10.1016/J.Jimonfin.2026.103555>
- Alwahidin, N., Jufra, A., Mulu, B., & Sari, K. N. (2023). A New Economic Perspective: Understanding The Impact Of Digital Financial Inclusion On Indonesian Households Consumption. *Bulletin Of Monetary Economics And Banking*, 26(2), 333-360. <https://doi.org/10.59091/1410-8046.2070>
- Damanik, I., Rompas, A., Nadia, Z., Berenschot, W., & Warburton, E. (2025). Business-Politics Relations In Indonesia: The Oligarchisation Of Democracy. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 61(1), 39-60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2442417>
- Datumula, F. A. N. (2025). The Commercialization Of Higher Education: Trends, Impacts, And Future Challenges. *Journal Of Education And Culture (Jec)*, 5(1), 34-48. <https://doi.org/10.47918/6z721b83>
- Dewi, M., Buchdadi, A. D. B., Mahfirah, T. F., & Wastuti, W. (2025). Financial Literacy As A Mediating Variable Between Financial Behavior And Financial Inclusion: Evidence From Generation Z In Indonesia. *International Journal On Advanced Science, Education, And Religion*, 8(2), 336-354. <https://doi.org/10.33648/Ijoaser.V8i2.1079>
- Hakobyan, S., Zymek, R., & Meleshchuk, S. (2023). *Divided We Fall: Differential Exposure To Geopolitical Fragmentation In Trade* (No. 2023/270). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400262302.001>
- Haryanto, & Mahsun, M. (2024). Business And Politics In Urban Indonesia: Patrimonialism, Oligarchy And The State In Two Towns. *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 43(2), 177-197. <https://doi.org/10.1177/18681034241264574>
- Hasibuan, A. A., Hasibuan, S. R. M., Pulungan, A. S., Hasibuan, L., & Sari, R. R. (2026). Analysis of Indonesia's Democratic Backsliding After 2024 Using an Institutional Democracy and Elite Power Approach. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1479-1491. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67799>
- Hidayat, A., & Shodrokov, X. (2025). The Effect Of The Human Development Index On Banking Stability In ASEAN. *Asia-Pacific Social Science Review*, 25(1), 5. <https://doi.org/10.59588/2350-8329.1558>
- Hoseini, S. M., Vahdaninia, V., & Asgharzadeh, A. (2026). Providing A Corporate Governance Ranking Model For Companies Affiliated With A Military Organization: An Approach Based On OECD 2024 Guidelines. *International Journal Of Industrial Engineering And Operational Research*, 8(1), 18-46. <https://doi.org/10.22034/Ijior.V8i1.206>
- Jameaba, M. S. (2024). Digitalization, Emerging Technologies, And Financial Stability: Challenges And Opportunities For The Indonesian Banking Sector And

- Beyond. *Emerging Technologies, And Financial Stability: Challenges And Opportunities For The Indonesian Banking Sector And Beyond* (April 26, 2024). [Http://Dx.Doi.Org/10.2139/SSrn.4808469](http://Dx.Doi.Org/10.2139/SSrn.4808469)
- Karimi, S. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Neoliberalisme Global. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1-10. <https://doi.org/10.52738/Pjk.V4ix.526>
- Khaliq, A. (2025). The Impact Of COVID-19 On Fintech Lending In Indonesia: Evidence From Interrupted Time Series Analysis. *Arxiv Preprint Arxiv:2505.06655*. <https://doi.org/10.48550/Arxiv.2505.06655>
- Mahendra, B. I. (2026). Dinamika Kekuasaan Dan Pengambilan Keputusan Politik Dalam Sistem Demokrasi Modern: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 10-21. <http://pub.simujurnal.com/index.php/POLARA/Article/View/2>
- Prayuti, Y., Lany, A., Hikmah, W. N., Puspitasari, A. A., Novita, N. A., & Kusriani, N. (2025). Dynamics Of Consumer Protection Law In The Development Of The Financial Technology Industry In Indonesia. *Law And Justice*, 10(1), 67-86. <https://doi.org/10.23917/Laj.V10i1.4804>
- Purba, B., Sihombing, A. E., Nasution, N. F., & Siagian, A. P. (2023). Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 402-414. <https://doi.org/10.30640/Ekonomika45.V10i2.1925>
- Rahmatulummah, A., Ramadhan, B. R., & Naura, I. A. (2025). Opportunities To Advance Indonesia's Economy Through The Oecd And Brics. *Budi Luhur Journal Of Strategic & Global Studies*, 3(1), 65-95. <https://doi.org/10.36080/Jsgs.V3i1.49>
- Rohmah, E. (2024). Perubahan Paradigma Politik Di Indonesia Dari Demokrasi Ke Oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 01-12. <https://doi.org/10.32734/Politeia.V16i1.12424>
- Rohmah, M., Basyir, T., Abror, D., Masitoh, F. N., & Azmiyati, A. (2025). Dampak Globalisasi, Kemiskinan, Dan Kebijakan Makroekonomi Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 9(01), 1-25. <https://doi.org/10.30599/Egxqdp09>
- Samosir, Y. R., & Silalahi, R. (2026). Masalah Ketimpangan Pendapatan Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 77-91. <https://doi.org/10.61722/Jaem.V3i1.9024>
- Sarjono, H., Pratama, E. H., Harianto, V. E., & Soeratin, B. S. (2026). Indonesia's Economy: Unlocking Opportunities In Emerging Markets. *Golden Ratio Of Finance Management*, 6(1), 86-97. <https://doi.org/10.52970/Grfm.V6i1.1189>
- Sharma, S., & Soederberg, S. (2020). Redesigning The Business Of Development: The Case Of The World Economic Forum And Global Risk Management. *Review Of International Political Economy*, 27(4), 828-854. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1640125>
- Som, L. (2022). *State Capitalism: Why Soes Matter And The Challenges They Face*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/Oso/9780192849595.003.0006>
- Sui-Ni, N. (2023). Peran Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045. *Arxiv Preprint Arxiv:2302.12837*. <https://doi.org/10.48550/Arxiv.2302.12837>
- Surdikina, N., Tompul, R. B., Sianipar, S. B., & Santika, S. (2025). Strategi Pengelolaan Utang Negara: Menjaga Stabilitas Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian Global. *AT-TAKLIM*:



- Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 162-173. <https://doi.org/10.71282/At-Taklim.V2i1.41>
- Susilo, D., Lila, W. L. P., Sukmayeti, E., Asante, A., Jan, S., Thabrany, H., ... & Liverani, M. (2025). Can Indonesia Achieve Universal Health Coverage? Organisational And Financing Challenges In Implementing The National Health Insurance System. *SSM-Health Systems*, 100138. <https://doi.org/10.1016/J.Ssmhs.2025.100138>
- Thomas, G. N., Nur, S. M. R., & Indriaty, L. (2024). The Impact Of Financial Literacy, Social Capital, And Financial Technology On Financial Inclusion Of Indonesian Students. *Arxiv Preprint* *Arxiv:2405.06570*. <https://doi.org/10.48550/Arxiv.2405.06570>
- Utami, N. I., Setyowibowo, F., & Sangka, K. B. (2025). Transformasi Ekonomi Digital Di Indonesia: Peluang, Tantangan, Dan Dampak Nya Terhadap Perekonomian. *Ebisman Ebisnis Manajemen*, 3(4), 24-32. <https://doi.org/10.59603/Ebisman.V3i4.1178>
- Warburton, E. (2024). Private Power And Public Office: The Rise Of Business Politicians In Indonesia. *Critical Asian Studies*, 56(2), 184-206. <https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2334069>
- Widiati, E. P. (2024). Regulatory Capture: Tantangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Di Negara Demokrasi. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 51-76. <https://doi.org/10.55292/5ezarv67>
- Wuwung, L., Mcilgorm, A., & Voyer, M. (2024). Sustainable Ocean Development Policies In Indonesia: Paving The Pathways Towards A Maritime Destiny. *Frontiers In Marine Science*, 11, 1401332. <https://doi.org/10.3389/Fmars.2024.1401332>
- Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The Rise Of Digital Finance: Financial Inclusion Or Debt Trap?. *Finance Research Letters*, 47, 102604. <https://doi.org/10.1016/J.Frl.2021.102604>